

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Senin 3 Februari 2025
Wilayah	Kota Makassar



Perekrutan Laskar Pelangi Dinilai Bebani Anggaran

Perekrutan Laskar Pelangi Dinilai Bebani Anggaran

MAKASSAR, UPEKS—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak melaku-

kan rekrutmen pegawai secara diam-diam, khususnya bagi tenaga Laskar Pelangi.

DPRD pun berencana memanggil pihak Pemkot untuk mem-

inta klarifikasi terkait kebijakan tersebut.

Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan

terkait rekrutmen tenaga honorer di beberapa instansi. Menurutnya, kebijakan ini berisiko membebani anggaran daerah yang sudah terbatas.

"Kami menerima laporan terkait hal ini. Oleh karena itu, kami meminta Pemkot Makassar untuk menghentikan langkah tersebut, karena akan menambah beban anggaran daerah," tegas Supratman.

Legislator tiga periode ini menambahkan bahwa saat ini sejumlah pegawai Laskar Pelangi telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan demikian, anggaran yang tersedia seharusnya lebih difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang sudah ada.

"Kami mendesak Pemkot Makassar untuk lebih transparan dalam proses rekrutmen pegawai dan memastikan prioritas anggaran diberikan untuk kesejahteraan pegawai yang sudah ada," tambah Legislator Fraksi NasDem tersebut.

Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan stabilitas anggaran daerah. DPRD

Makassar akan terus mengawasi langkah Pemkot guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat khusus di DPRD untuk mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat oleh Pemkot Makassar," ujar Supratman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, juga menyoroti kebijakan rekrutmen pegawai yang dinilai harus direncanakan secara matang dan dibahas bersama DPRD agar sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

"Kami akan terus memantau dan mengawasi langkah Pemkot untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat," imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem rekrutmen di Pemkot Makassar. "Jika ada pegawai yang dibutuhkan, lakukan seleksi secara terbuka, adil, dan berdasarkan kebutuhan yang nyata. Jangan sampai kebijakan ini menjadi beban jangka panjang bagi daerah," tuturnya. (jr)



Ketua DPRD Makassar, Supratman

IST